

PEMANFAATAN RUANG PUBLIK KOTA OLEH PKL DARI SUDUT PANDANG ARSITEKTUR EMPATI

Joses Gandhi¹⁾, Mieke Choandi^{2)*}

¹⁾Program Studi S1 Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Tarumanagara,
joses.315200059@stu.untar.ac.id

^{2)*}Program Studi S1 Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Tarumanagara, miekec@ft.untar.ac.id

*Penulis Korespondensi: miekec@ft.untar.ac.id

Masuk: 11-12-2023, revisi: 25-03-2024, diterima untuk diterbitkan: 26-04-2024

Abstrak

Pertumbuhan penduduk Indonesia meningkat pesat tiap tahunnya, salah satu penyebabnya adalah urbanisasi. Namun, ketersediaan lapangan kerja di sektor formal tidak dapat mengimbangi pertumbuhan penduduk yang pesat. Oleh karena itu, sektor informal menjadi opsi terakhir bagi penduduk dan pendatang untuk menghindari pengangguran, dan pedagang kaki lima (PKL) termasuk salah satu sektor informal yang berkembang menjadi bagian integral dalam tata kehidupan warga kota di perumahan, pendidikan, rekreasi dan ruang kehidupan lainnya. Perkembangan PKL di kota meningkat signifikan dan membawa keuntungan bagi masyarakat, tetapi terdapat pula beberapa hal yang merugikan masyarakat lokal sekitar, seperti pemakaian jalur pejalan kaki menjadi tempat usaha untuk berjualan. Hal ini berdampak buruk terhadap estetika dan kebersihan dari lingkungan kota. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan data yang didapat melalui wawancara dan melakukan studi pustaka. Penelitian ini berfokus untuk menginvestigasi sejauh mana arsitektur dapat membantu meningkatkan kesejahteraan dan kelangsungan hidup pekerja sektor informal, khususnya PKL dan menemukan solusi untuk mengatasi masalah yang timbul akibat kehadiran PKL dalam skala kecil maupun besar. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menghilangkan stigma tentang PKL yang kotor dan hanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menengah ke bawah saja. Diharapkan hasil penelitian ini dapat membantu dan meningkatkan kualitas hidup dari masyarakat terutama di perkotaan, tanpa merusak estetika dari ruang publik kota.

Kata kunci: kualitas hidup; pedagang kaki lima; ruang publik; sektor informal; urbanisasi

Abstract

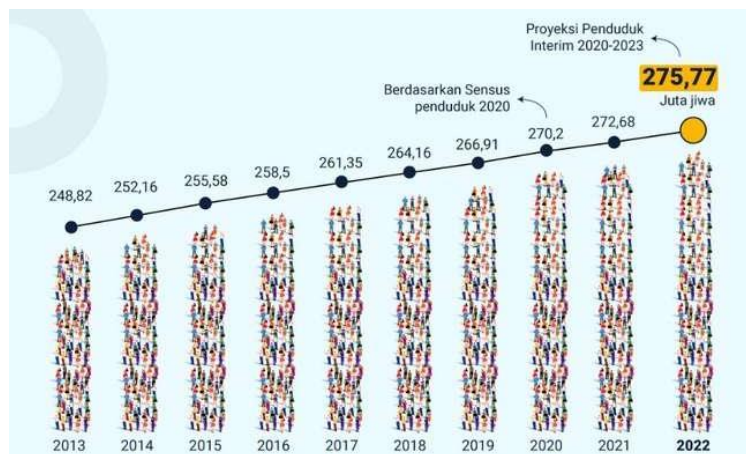
Indonesia's population growth increases rapidly every year, one of the causes is urbanization. However, the availability of job opportunities in the formal sector cannot keep up with rapid population growth. Therefore, the informal sector is the last option for residents and immigrants to avoid unemployment, and street vendors (PKL) are one of the informal sectors that have developed into an integral part of the life of city residents in housing, education, recreation and other living spaces. The development of street vendors in the city has increased significantly and brought benefits to the community, but there are also several things that are detrimental to local communities, such as the use of pedestrian paths as business places for selling. This has a negative impact on the aesthetics and cleanliness of the city environment. This research uses a qualitative descriptive method with data obtained through interviews and conducting literature studies. This research focuses on investigating the extent to which architecture can help improve the welfare and survival of informal sector workers, especially street vendors and find solutions to overcome problems that arise due to the presence of street vendors on a small and large scale. Apart from that, this research aims to eliminate the stigma about street vendors being dirty and only for the lower middle class community. It is hoped that the results of this research can help and improve the quality of life of the community, especially in urban areas, without damaging the aesthetics of urban public spaces.

Keywords: informal sector; public space; quality of life; street food vendors; urbanization

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pertumbuhan penduduk di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup pesat setiap tahunnya. Pada tahun 2022, jumlah penduduk Indonesia meningkat sebesar 1,13% dari tahun sebelumnya, mencapai 275,77 juta jiwa (Nurhanisah, 2023). Pertumbuhan penduduk yang pesat terutama terjadi di kota-kota besar seperti Jakarta, dimana banyak penduduk desa yang bermigrasi ke kota dalam upaya mencari pekerjaan dan meningkatkan kualitas hidup mereka, fenomena yang dikenal sebagai urbanisasi (Sastrawan, 2015). Namun, kehidupan di kota tidak selalu memenuhi harapan mereka. Ketersediaan lapangan kerja di sektor formal tidak dapat mengimbangi pertumbuhan penduduk yang pesat. Terlebih lagi, sektor formal memiliki persyaratan pendidikan dan keterampilan tertentu yang sebagian besar pendatang kurang memenuhinya (Sastrawan, 2015). Sebagai akibatnya, banyak dari mereka tidak dapat bekerja di sektor formal terpaksa mencari mata pencaharian di sektor informal. Sektor informal menjadi jalan keluar dalam menghadapi masalah ketidakterserapan tenaga kerja dan dampak dari krisis ekonomi.



Gambar 1. Pertambahan Penduduk

Sumber: <https://indonesiabaik.id/>

Sektor informal memiliki karakteristik yang tidak terorganisir, usaha mandiri, tidak memiliki aturan yang teratur, dan biaya yang berasal dari sumber yang tidak resmi (Jayadinata, 1999). Faktor-faktor ini membuat sektor informal menjadi pilihan terakhir bagi penduduk dan pendatang untuk menghindari pengangguran. Sektor ini dapat menampung tenaga kerja karena tidak memiliki persyaratan pendidikan dan keterampilan yang tinggi, modal kerja, pendidikan dan fasilitas yang sederhana, serta lokasi mudah dijangkau oleh masyarakat umum. Pedagang Kaki Lima (PKL) menjadi salah satu bentuk sektor informal yang berkembang pesat di perkotaan. PKL memiliki dampak multi-aspek dalam kehidupan kota, seperti aspek ekonomi, kuliner, pariwisata perkotaan, dan tata ruang kota. PKL telah menjadi bagian integral dalam kehidupan masyarakat, berkontribusi dalam bidang perumahan, pendidikan, rekreasi, dan ruang kehidupan lainnya (Pranata & Purbadi, 2020). PKL dianggap sebagai solusi dalam menghadapi krisis ekonomi dan kemiskinan, serta dapat menjadi alat efektif dalam revitalisasi ruang kota.

Meskipun PKL memberikan manfaat bagi masyarakat, terdapat beberapa masalah yang timbul terkait dengan kehadiran mereka. Salah satunya adalah penggunaan jalur pejalan kaki sebagai tempat berjualan, akibat biaya sewa tempat yang tinggi. PKL juga dapat menimbulkan dampak buruk bagi kebersihan, ketertiban, keamanan, kemacetan lalu lintas dan masalah bagi estetika pada lingkungan kota. PKL merupakan kebutuhan bagi masyarakat, namun perlu adanya penyelesaian untuk mengatasi dampak negatif terhadap ruang publik kota melalui inovasi dan penegakan peraturan yang tepat atau yang sudah diatur oleh peraturan pemerintah.

Rumusan Permasalahan

Setelah mengetahui isu permasalahan yang dihadapi PKL di kota Jakarta, maka timbul pertanyaan mengenai bagaimana upaya dan solusi dalam mempertahankan keberadaan PKL dan memberi wadah yang tepat bagi PKL di ruang publik, serta menghilangkan dampak negatif yang ditimbulkan. Kemudian setelah mengetahui Solusi untuk memperthankan keberadaan PKL, timbul lagi pertanyaan mengenai bagaimana upaya penataan PKL di ruang publik kota agar dapat menjaga keseimbangan antara kehidupan sekitar dan PKL dari sudut pandang arsitektur empati.

Tujuan

Untuk mengetahui seberapa penting dan besar peranan arsitektur dalam membantu meningkatkan kelangsungan hidup pekerja sektor informal terutama pada PKL. Menghasilkan solusi untuk mengurangi dampak dari kegiatan PKL dalam hal masalah keruangan kota, namun tetap membuat PKL sejahtera.

2. KAJIAN LITERATUR

Empati

Empati merupakan kemampuan untuk memahami perasaan dan masalah orang lain, berpikir dari sudut pandang mereka, serta menghargai perbedaan dalam pandangan tentang berbagai hal (Goleman, 1996). Moralitas secara fundamental bersumber dari empati, karena ketika seseorang mengalami kesulitan, muncul dorongan untuk memberikan bantuan (Hoffman, 2000). Definisi lain menyatakan bahwa empati adalah kemampuan untuk memahami dan berhubungan dengan pengalaman kognitif dan afektif orang lain (Hodgson dan Wertheim, 2007).

Empati adalah kemampuan untuk menempatkan diri pada posisi orang lain dalam suatu situasi, dengan adanya perbedaan sudut pandang (Book dan Stein, 2002). Empati dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk menempatkan diri dalam posisi orang lain dan memahami pengalaman yang mereka alami (Hurlock, 1978). Sikap empati berbeda dengan simpati, karena simpati lebih berfokus pada perasaan sendiri sementara empati lebih memusatkan perhatian pada kondisi orang lain (Budiningsih, 2008). Empati sangat terkait dengan indera manusia dan menjadi dasar untuk membangun hubungan sosial dengan orang lain (Goleman, 1996). Untuk menjadi empatik, seseorang perlu memiliki kesadaran diri yang kuat terhadap pengalaman emosinya sendiri. Kesadaran diri yang kuat memungkinkan seseorang lebih mudah membaca dan memahami emosi orang lain.

Empati Arsitektur

Arsitektur tidak hanya terkait dengan aspek fisik dan estetika dari bangunan, tetapi juga memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan tubuh dan perasaan manusia. Pengalaman arsitektur seharusnya melibatkan semua indera manusia, termasuk persepsi terhadap material, sentuhan, tekstur, berat, dan cahaya. Pengalaman ini tidak hanya memberikan informasi kognitif, tetapi juga memengaruhi emosi dan perasaan pengguna. Dalam konteks ini, interaksi antara pengguna dan bangunan menjadi kunci untuk mengaktifkan semua indera dan menciptakan pengalaman yang dapat meningkatkan kualitas hidup manusia melalui sensasi seperti kenyamanan, kehangatan, bermain, keingintahuan, dan ketenangan (Droog dan Vries, 2009). Salah satu prinsip penting dalam menciptakan arsitektur yang berempati adalah kesadaran diri terhadap pengalaman emosional sendiri. Dengan memiliki kesadaran diri yang kuat terhadap pengalaman emosional, seseorang dapat lebih mudah memahami emosi orang lain. Dalam konteks arsitektur, hal ini berarti bahwa arsitek harus mampu menempatkan diri sebagai pengguna bangunan yang akan dirancang, baik dari segi fisik maupun mental. Dengan demikian, arsitek dapat memahami sudut pandang orang lain dan menciptakan perspektif baru yang

meningkatkan pemahaman akan kebutuhan pengguna, serta menemukan solusi desain yang lebih baik.

Dinyatakan bahwa otak manusia dapat terus beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya dan lingkungan yang sehat juga dapat memberikan dampak positif pada kesehatan serta berperan dalam pengobatan untuk memulihkan ingatan lama melalui stimulasi otak. Pengaruh ini dapat mencakup pengaruh terhadap perilaku melalui sensasi dan persepsi, serta memengaruhi kemampuan seseorang dalam pengambilan keputusan dan pengalaman emosional. Berbagai indra, seperti pendengaran, perasaan, dan penciuman, dapat memainkan peran dalam penyimpanan dan pengingatan informasi. Semua ini dapat dipengaruhi oleh desain lingkungan, dan arsitektur memiliki peran penting dalam menciptakan pengalaman yang dirasakan. Komponen-komponen seperti air, tinggi plafon, cahaya alami, warna, dan gaya dapat dimanfaatkan oleh arsitektur untuk memicu berbagai jenis emosi, termasuk ketertarikan, kesenangan, minat, relaksasi, dan bahkan stres.

Sektor Informal

Konsep sektor informal pertama kali diperkenalkan oleh Keirt Hard dari University of Manchester pada tahun 1973. Hard mendeskripsikan sektor informal sebagai bagian dari tenaga kerja di perkotaan yang beroperasi di luar pasar tenaga kerja yang terorganisir. Lalu, konsep ini dikembangkan oleh ILO (*International Labour Organization*) lewat penelitian yang dilakukan di negara-negara yang berkembang. Konsep tersebut dianggap sebagai salah satu alternatif untuk mengatasi masalah kemiskinan di negara berkembang, terkait dengan pengangguran, migrasi, dan urbanisasi. Seiring waktu, sektor informal diyakini dapat mengurangi tingkat pengangguran di kota-kota pada negara berkembang. Bahkan, beberapa pengamat pembangunan di negara yang berkembang melihat sektor informal sebagai strategi alternatif dalam mengatasi keterbatasan lapangan kerja. Sektor informal berfungsi sebagai "*safety valve*" yang dapat mengurangi potensi ledakan sosial akibat peningkatan jumlah pencari kerja, baik dari dalam ataupun luar kota.

Sektor informal terdiri dari sekelompok pedagang dan penyedia jasa kecil yang secara ekonomi sangat menguntungkan, meskipun mereka hidup dalam kondisi kemiskinan. Struktur dalam sektor informal mencakup istilah "usaha sendiri" yang mencakup jenis pekerjaan yang kurang terorganisir, sulit dilacak, sering diabaikan dalam sensus resmi, dan pekerjaan yang jarang diatur oleh aturan hukum. Mereka termasuk pedagang, pekerja tanpa ikatan dan keterampilan khusus, serta kelompok lain dengan pendapatan rendah dan tidak stabil. Mereka hidup dalam kondisi sulit dan seringkali beroperasi dalam batas-batas ekonomi kota dengan tingkat kesulitan hidup dan potensi kegiatan yang semi-kriminal (Manning dan Effendi, 1991).

Ciri-Ciri Sektor Informal

Menurut Wirosardjono (1985), ciri-ciri dari sektor informal sebagai berikut: Kegiatannya cenderung tidak teratur, baik dari segi waktu, modal, maupun permintaan; Tidak terikat oleh regulasi atau aturan pemerintah, membuat kegiatan ini sering dianggap sebagai kegiatan informal; Modal, peralatan, perlengkapan dan omset umumnya kecil, dihitung berdasarkan aspek harian; Tidak memiliki keterkaitan dengan bisnis skala besar; Biasanya dilakukan dan melayani kelompok masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah; Tidak memerlukan keahlian atau keterampilan khusus, sehingga dapat melibatkan berbagai tingkat pendidikan tenaga kerja; Umumnya, setiap usaha melibatkan sedikit tenaga kerja yang berasal dari keluarga, kenalan, atau daerah yang sama; Tidak familiar dengan sistem perbankan, pencatatan keuangan, atau pembiayaan.

Terdapat 11 ciri yang dikemukakan oleh Urip Soewarno dan Hidayat mengenai sektor informal yang identik dengan hal dikemukakan oleh Wirosarjono. Kesebelas ciri tersebut sebagai berikut: Kegiatan dalam sektor ini tidak terstruktur dengan baik karena tidak melibatkan lembaga formal; Kebijakan pemerintah tidak mencakup sektor ini, sehingga sektor informal tidak memiliki keterkaitan langsung dengan pemerintah; Umumnya, setiap unit usaha tidak memiliki izin resmi dari pemerintah; Pola kegiatan cenderung tidak teratur, baik dalam hal lokasi maupun jam kerja; Unit usaha dalam sektor ini memiliki fleksibilitas untuk beralih dari satu subsektor ke subsektor lainnya; Penggunaan teknologi dalam sektor ini termasuk dalam kategori sederhana; Modal dan aset usaha relatif kecil, sehingga skala operasional unit usaha juga kecil; Skala operasional yang terbatas dan tingkat teknologi yang sederhana memungkinkan pengelolaan usaha tanpa memerlukan tingkat pendidikan formal tertentu; keahlian dapat diperoleh melalui pendidikan nonformal dan pengalaman; Sebagian besar unit usaha termasuk dalam kategori *one-man enterprise*, atau jika melibatkan pekerja, pekerja tersebut sering berasal dari lingkungan keluarga dan disebut sebagai *family enterprise*; Sumber dana untuk modal, baik modal tetap maupun modal kerja, sebagian besar berasal dari tabungan pribadi dan sumber keuangan nonresmi; Hasil produksi dan jasa dari sektor ini umumnya dikonsumsi oleh kelompok berpenghasilan rendah, kadang-kadang juga oleh kelompok menengah ke atas. Dari ciri-ciri tersebut, terlihat jelas bahwa PKL termasuk ke dalam sektor informal dan sesuai dengan ciri-ciri diatas, maka pencari kerja lebih mudah memasukinya.

Faktor Munculnya Sektor Informal

Terdapat beberapa kondisi dan faktor yang menyebabkan kehadiran sektor informal di perkotaan terus berkembang (Alisjahbana, 2003) , yaitu:

Tabel 1. Kondisi dan Faktor yang Menyebabkan Kehadiran Sektor Informal di Perkotaan

Kondisi dan Faktor	Penjelasan
Investasi di wilayah perkotaan	Investasi yang terfokus di wilayah perkotaan mendorong urbanisasi, namun jumlahnya melebihi ketersediaan lapangan kerja, menyebabkan tingginya tingkat pengangguran yang kemudian diabsorpsi oleh sektor informal.
Peluang pekerjaan	Berkurangnya peluang pekerjaan di sektor pertanian mendorong migrasi tenaga kerja dari pedesaan ke perkotaan untuk mencari pekerjaan, menciptakan surplus tenaga kerja di perkotaan. Kelebihan tenaga kerja dan keterbatasan lapangan kerja formal mendorong penduduk lokal dan pendatang untuk beralih ke pekerjaan sektor informal, seperti menjadi pedagang kaki lima.
Potensi pasar	Potensi pasar yang tinggi di perkotaan, dengan daya beli yang kuat, menciptakan peluang besar untuk berbisnis di sektor perdagangan. Oleh karena itu, kegiatan berdagang dianggap sebagai salah satu potensi yang menjanjikan untuk meraih keuntungan dengan cepat dan mudah.
Tingkat pendidikan	Rendahnya tingkat pendidikan memiliki dampak dalam bersaing dengan individu yang memiliki pendidikan tinggi dalam mencari pekerjaan di sektor formal. Di Indonesia, kecenderungan untuk menilai kemampuan seseorang berdasarkan latar belakang pendidikan (seperti lulusan SD, SMP, SMA) daripada kemampuan nyata untuk menjalankan tugas tertentu tidak bisa diabaikan.
Pengalaman	Pengalaman, kisah sukses bertahan hidup di perkotaan, atau ajakan dari rekan sesama desa yang sudah lebih dulu berpindah ke kota, juga menjadi faktor yang mendorong penduduk desa untuk mencari kehidupan di perkotaan.

Sumber: Alisjahbana, 2003

Pedagang Kaki Lima (PKL)

Pedagang kaki lima merupakan jenis usaha dengan modal relatif rendah yang fokus pada produksi dan penjualan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Usaha ini biasanya beroperasi di lokasi-lokasi yang dianggap strategis dalam lingkungan informal (Yunus, 2011). Istilah "pedagang kaki lima" berasal dari era penjajahan Inggris, diambil dari lebar ukuran trotoar, pada saat itu diukur dengan satuan feet (kaki), yaitu sekitar 31 cm lebih sedikit. Lebar trotoar waktu itu sepanjang lima kaki atau sekitar 1,5 meter lebih sedikit (An-nat, 1993). PKL, singkatan dari Pedagang Kaki Lima, digunakan untuk merujuk pada pedagang yang beraktivitas komersial di atas daerah milik jalan (DMJ) yang seharusnya diperuntukkan untuk pejalan kaki. Beberapa pandangan juga mengidentifikasi PKL sebagai pedagang yang menggunakan gerobak. Kesimpulannya, pedagang kaki lima adalah mereka yang berusaha di tempat umum tanpa adanya izin resmi dari pihak pemerintah.

Ciri-Ciri Pedagang Kaki Lima (PKL)

Ciri-ciri dari pedagang kaki lima, sebagai berikut: Pedagang kaki lima seringkali berperan ganda sebagai produsen; Sifatnya berbeda-beda, ada yang menetap di lokasi tertentu, sementara yang lain berpindah dari satu tempat ke tempat lain menggunakan pikulan, kereta dorong, tempat atau stan yang tidak permanen, dan dapat dipasang dan dibongkar; Berfokus pada penjualan eceran bahan makanan, minuman, dan barang konsumsi lainnya yang memiliki daya tahan relatif lama; Umumnya memiliki modal kecil, bahkan hanya sebagai perantara bagi pemilik modal dengan mendapatkan komisi atau imbalan atas usaha mereka; Kualitas barang yang dijual cenderung rendah dan biasanya tidak memenuhi standar; Volume peredaran uang relatif kecil, dengan pembeli umumnya memiliki daya beli yang rendah; Usaha skala kecil dapat berupa *family enterprise*, dimana anggota keluarga, termasuk ibu dan anak-anak, turut serta membantu dalam kegiatan usaha tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung; Tawar-menawar antara penjual dan pembeli menjadi karakteristik khas dalam usaha pedagang kaki lima; Pelaksanaan pekerjaan dapat dilakukan secara penuh waktu, sebagian waktu, atau pada waktu senggang, bahkan ada yang melaksanakannya secara musiman; Barang yang dijual umumnya termasuk *convenience goods* dan jarang menjadi *specialty goods*; Seringkali, para pedagang kaki lima beroperasi dalam suasana psikologis yang tidak stabil, dikhawatirkan kegiatan mereka dapat dihentikan oleh Tim Penertiban Umum (TEBUM) dan satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah. Secara kesimpulan dari ciri-ciri diatas, PKL adalah salah satu lapangan kerja sektor informal yang mempengaruhi faktor ekonomi saja, tetapi terdapat sosial maupun politik.

Pemilihan Lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL)

Menurut (Sastrawan, 2015), faktor-faktor yang mempengaruhi dan harus diperhatikan dalam pemilihan lokasi usaha PKL adalah, sebagai berikut: Akses, lokasi mudah di jangkau dengan sarana transportasi umum; Visibilitas, yang berarti bahwa lokasi dapat terlihat dengan mudah dari jarak pandang normal; Faktor lalu lintas melibatkan dua aspek utama, yaitu aktivitas orang yang melewati area tersebut dapat menciptakan peluang besar untuk keputusan pembelian yang bersifat impulsif, tanpa perencanaan khusus dan kepadatan dan kemacetan lalu lintas juga dapat menjadi kendala; Fasilitas parkir yang luas, nyaman, dan aman, cocok untuk kendaraan roda dua maupun roda empat; Ketersediaan ruang yang cukup untuk ekspansi di masa mendatang; Pengaruh lingkungan sekitar terhadap produk yang ditawarkan; Aspek persaingan, seperti lokasi dari pesaing sejenis di daerah atau jalur yang sama, juga perlu dipertimbangkan dalam menentukan lokasi; Peraturan pemerintah.

Peraturan Mengenai Pedagang Kaki Lima (PKL)

Pada Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan PKL adalah sebagai berikut,

Tabel 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan

No.	Pedoman Penataan	Penjelasan
1.	Pedagang kaki lima	yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usahab Bergerak maupun tidak Bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan atau swasta yang bersifat sementara atau tidak menetap
2.	Penataan PKL	upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
3.	Pemberdayaan PKL	upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya
4.	Lokasi PKL	tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada di lahan dan atau bangunan milik pemerintah daerah atau swasta
5.	Lokasi binaan	lokasi yang telah ditetapkan peruntukannya bagi PKL yang diatur oleh pemerintah daerah, baik bersifat permanen maupun sementara
6.	Tanda Daftar Usaha	yang selanjutnya disebut TDU, adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha

Sumber: Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012

Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL)

Kehadiran Pedagang Kaki Lima (PKL) di suatu kota pada dasarnya tidak terencana dan menimbulkan masalah bagi tata kota yang tidak teratur. Untuk mengatasi ketidakaturan ini, muncul ide relokasi. Relokasi adalah usaha untuk menempatkan kembali kegiatan tertentu ke lahan yang sesuai dengan peruntukannya. Menurut (Ramdhani, 2005), terdapat hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam penentuan lokasi relokasi PKL, yaitu: Strategis secara lokasional, yang berarti bahwa konsumen dapat dengan mudah mencapai tempat usaha pedagang kaki lima karena aksesibilitas yang mendukung; Aspek visualitas, menciptakan kesan harmonis dan menarik sehingga dapat memikat perhatian konsumen; Hierarki pembangunan, mencakup jangkauan pelayanan yang optimal dan efisien; Biaya sewa atau penjualan tanah atau kios yang terjangkau, sehingga tidak memberatkan bagi para pedagang.

Menurut (Apriyanto, 2003) berikut hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan lokasi untuk relokasi PKL, antara lain: Mempertimbangkan lokasi dan permintaan barang dengan seksama; Menyediakan akses masuk pasar yang memadai, minimal dua jalur untuk masuk dan keluar; Berlokasi dekat dengan terminal atau stasiun kereta untuk memudahkan pergerakan konsumen dan pedagang; Menyediakan prasarana dan sarana pendukung yang memadai, termasuk drainase, listrik, gas, air bersih, dan tempat pembuangan sampah (TPS).

Ruang Publik Kota

Ruang publik adalah area terbuka di luar bangunan seperti jalan, lapangan, dan taman kota yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan masyarakat secara individu maupun kelompok. Fungsinya mencakup aspek sosial dan ekologis. Secara sosial, ruang publik menjadi tempat untuk bermain, berolahraga, berkomunikasi, menciptakan keharmonisan, memperindah lingkungan, dan memisahkan antara bangunan. Secara ekologis, ruang publik berperan dalam menyegarkan udara, menyerap air hujan, menjaga ekosistem, meredakan arsitektur, dan sebagainya. Jika ruang publik digunakan sesuai dengan fungsinya, maka dapat menjadi elemen estetika dalam lingkungan kota, dengan mempertimbangkan elemen dan aktivitas yang ada di

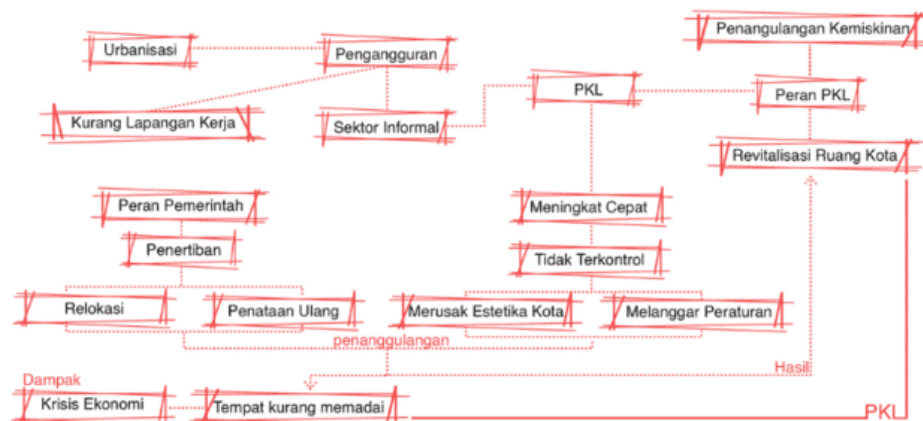
dalamnya. Ruang publik tidak dimiliki oleh individu tertentu, melainkan dapat diakses oleh semua orang tanpa batasan waktu dan aktivitas. Namun, kebebasan dalam waktu dan aktivitas di ruang publik dapat menjadi tantangan bagi perkembangan kota (Sidabutar, 2018).

Third Place

Third Place adalah lingkungan sosial yang terpisah dari dua lingkungan sosial rumah ("tempat pertama") dan tempat kerja ("tempat kedua"). Tempat ketiga memiliki kegiatan yang berbeda dari tempat pertama dan kedua, bertujuan untuk mengesampingkan kekhawatiran mereka bersantai atau relaksasi dari kesibukan dan beban yang mereka punya. Dapat membantu masalah keseharian yang dialami, membantu menenangkan pikiran dan tubuh untuk sementara. Menurut Ray Oldenburg, berikut karakteristik dari *third place*: Tempat Netral, Tempat Tanpa Kelas, percakapan adalah kegiatan utama, aksesibilitas dan akomodatif, Para pelanggan tetap, Tempat yang rendah hati, Moodnya menyenangkan, Jauh dari rumah (Oldenburg dan Brissett, 1982).

Kerangka Berpikir

Berikut kerangka berpikir yang dilakukan penulis:



Gambar 2. Kerangka Berpikir

Sumber: Penulis, 2023

3. METODE

Penelitian ini mengadopsi metode deskriptif kualitatif, yang merupakan pendekatan penelitian yang terkait dengan filsafat positivisme. Pendekatan ini digunakan untuk mengeksplorasi kondisi alami objek penelitian tanpa melibatkan eksperimen. Data diperoleh secara langsung dari objek atau subjek penelitian dengan melakukan survei lapangan dengan melakukan wawancara dengan beberapa pedagang. Sedangkan terdapat data yang diperoleh secara tidak langsung dengan menggunakan metode studi pustaka, mencakup dokumen-dokumen resmi pada instansi terkait, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan. Tujuan dari penelitian deskriptif kualitatif adalah untuk memberikan gambaran, lukisan, penjelasan, dan pemahaman yang mendalam terhadap permasalahan yang sedang diteliti dengan mendalami individu, kelompok, atau kejadian.

4. DISKUSI DAN HASIL

Sektor informal, terutama Pedagang Kaki Lima (PKL), telah terbukti menjadi solusi efektif dalam mengatasi permasalahan sosial dan krisis ekonomi. Dengan sifatnya yang tidak memerlukan keterampilan dan modal besar, sektor ini mampu memberikan lapangan kerja bagi penduduk dalam kota dan imigran urbanisasi. PKL beroperasi di pinggir jalan dan daerah milik jalan untuk pejalan kaki, mengikuti kebutuhan dan keinginan warga setempat. Berbagai metode berjualan, seperti gerobak, sepeda, motor, atau tenda, disesuaikan dengan produk dan keuangan individu.

Meskipun memberikan akses pekerjaan dan produk yang sesuai dengan kebutuhan lokal, kualitas beberapa produk PKL mungkin tidak selalu memenuhi standar, berada di bawah rata-rata toko atau restoran.



Gambar 3. Cara Berjualan PKL
Sumber: Penulis, 2023

Dikarenakan keterbatasan dari keuangan, lokasi sebagai tempat berjualan cenderung di lokasi yang kurang baik dan higienis, seperti dekat gorong-gorong air, depan toko yang sudah tutup dan lainnya. Hal ini mengakibatkan kurangnya fasilitas yang memadai, sehingga terjadinya pembuangan sampah sembarangan, tidak adanya sistem kebersihan dan lainnya. Lingkungan yang kotor berdampak terhadap pengunjung atau konsumen yang datang, sehingga target dari PKL cenderung mengarah ke masyarakat menengah ke bawah. Keberadaan PKL tidak dapat tergantikan dikarenakan menjadi salah satu kebutuhan konsumsi dari masyarakat menengah ke bawah, tapi di satu sisi PKL membawa dampak buruk bagi estetika lingkungan kota dan ketertiban setempat dikarenakan cara berjualannya.



Gambar 4. Lingkungan Sekitar PKL
Sumber: Penulis, 2023

PKL sangat berkembang dengan pesat khususnya di Jakarta, hal ini sudah menjadi salah satu ciri khas dari suatu kawasan maupun kota Jakarta yang tidak dapat dihindari atau hilangkan. Untuk dapat bertahan hidup, PKL harus dapat berkembang terus dan menyesuaikan dengan lingkungan sekitarnya. PKL yang biasa sifatnya tidak teratur, kurang higienis, dan pandangan buruk lainnya dapat dihilangkan dengan usaha dari pedagang serta pemerintah. Harus ada yang dapat mewadahi kegiatan dari PKL ini sendiri, PKL tidak selalu buruk dan merusak estetika lingkungan kota, tetapi malah sebaliknya. Jika tertata dengan rapih dan baik, dapat meningkatkan estetika kota, meningkatkan pendapatan dari penjual, memperbaiki standar dari produk penjual, menghidupkan suatu kawasan baik pada siang ataupun malam hari, bahkan menjadi simbol atau node dari suatu kawasan itu sendiri. Terdapat beberapa contoh yang sudah ada seperti pada Blok M yang tetap hidup pada malam hari dikarenakan adanya kuliner sekitar, pada Pasar Baru yang pernah menjadikannya *shopping street* pada malam hari, Pasar Lama di Tangerang yang menjadi tempat kuliner dan simbol dari kawasan itu. Terdapat beberapa usaha yang dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan yang ada, pertama adanya pemilihan lokasi ataupun relokasi yang tepat dan sesuai dengan kajian yang terdapat di atas. Penyediaan tempat yang

dikhususkan bagi PKL berkumpul dan berjualan dengan waktu yang telah disesuaikan kegiatan sekitar kawasan, serta memberikan fasilitas yang terjangkau dari biaya kebersihan dan listrik ataupun air.



Gambar 5. Jalan Sebelah Universitas Tarumanagara
Sumber: google.com

Gambar tersebut menunjukkan penyediaan unit dengan fasilitas, namun biaya sewa dan kendala finansial membuat tidak semua pedagang dapat memanfaatkannya. Meskipun demikian, konsep ini memberikan solusi untuk mengatasi ketidakteraturan pedagang dan dapat menyaring mereka yang mampu memenuhi standar. Contoh lain terlihat di Pasar Modern Paramount, di mana aktivitas kuliner sepanjang jalan, terutama pada sore hingga malam, menciptakan lingkungan yang beragam dengan berbagai pedagang makanan. Ada yang berjualan dengan tenda, gerobak yang disesuaikan, hingga toko dan restoran. Keberagaman ini menciptakan harmoni di lingkungan tersebut, dapat dinikmati oleh masyarakat berpendapatan rendah maupun tinggi.



Gambar 6. Pasar Modern Paramount
Sumber: Mark S, 2022

Arsitektur juga dapat berperan besar dalam menanggulangi masalah yang ada, dari menempatkan lokasi yang strategis bagi para PKL, mendesain dan menyediakan fasilitas yang dibutuhkan bagi PKL. Selain itu arsitektur dapat melakukan inovasi serta mendesain tempat berjualan yang disesuaikan dengan kebutuhan dari pedagang karena akan mempengaruhi cara berjualan dari PKL sendiri. Terdapat beberapa proyek yang diambil sebagai contoh yang telah diterapkan di negara lain, yaitu *Targ Blonie Market* oleh *Aleksandra Wasilkowska Architectural Studio* yang terletak di komune Blonie, sebuah kota kecil dekat Warsawa, *Dadad Market* didesain oleh *Bangkok Tokyo Architecture + OPH* terletak di depan pusat perbelanjaan lokal di Nakorn Ratchasima, dan *Yolechang 2020 Market* oleh *UAO Design* terletak di Wuhan. Berikut deskripsi serta perbandingan dari ketiga proyek yang dijadikan sebagai studi preseden.

Penyandingan Preseden

Berbagai macam proyek pasar yang sudah ada memiliki fungsi yang berbeda-beda, antara lain:

Tabel 3. Analisis Pengamatan Preseden

Informasi Proyek	Targ Blonie Market	Dadad Market	Yolechang 2020 Market
Fungsi Proyek	Taman, Pasar dan Bazaar	Pasar dan Bazaar	Pasar dan Bazaar
Luas Proyek	1453m2	342 m2	3195m2
Konteks Pembangunan	Bertujuan untuk merevitalisasi pasar serta mengubahnya untuk mengatasi standar kesehatan yang kurang baik dan kurangnya infrastruktur pasar dasar. Menjadikan ruang publik hibrid yang menggabungkan dua fungsi sosial yaitu taman dan bazaar	berfungsi sebagai tempat yang dapat menarik perhatian warga sekitar dengan memasukan budaya lokal yang beragam serta dapat menjadi tempat berkumpulnya penduduk lokal dan anak muda yang terlihat cantik saat malam hari.	Bertujuan untuk mengimplementasikan rencana revitalisasi lingkungan lama melalui kegiatan desain kesejahteraan masyarakat dan pada saat yang sama meningkatkan kepercayaan untuk melanjutkan pekerjaan dan produksi dikarenakan sedang dilanda pandemic Covid.
Program Ruang Utama	Pasar, kedai makan, Ruang Publik, Taman, Playground	Pasar, Ruang Publik, kedai makan	Pasar, Ruang Publik, Exhibition
Kelebihan	Menjadikan ruang public yang serba guna, dapat menjadi pasar dan tempat makan dan saat ada acara dapat digelar disini, tetapi saat tidak ada apa-apa masih dapat berfungsi. Serta mendukung kebutuhan warga lokal.	Dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman serta lingkungan sekitarnya. Menyediakan tempat yang layak serta dapat menarik dengan material yang mudah dibongkar-pasang dan murah.	Dapat beradaptasi dengan keadaan saat itu, dan adanya penyesuaian bangunan dengan konteks lingkungan yang sudah ada disekitarnya, sampai memerhatikan penggunaan material yang dipakai.
Kekurangan			Hanya bersifat sementara saja, bertahan hanya tiga minggu.

Sumber: Penulis, 2023

Kesimpulan Penyandingan Proyek

Ketiga proyek ini memiliki fungsi utama kurang lebih sama, yaitu pasar dan bazaar. Ketiga proyek ini didirikan dikarenakan terdapat masalah tertentu yang ada di lingkungan sekitarnya, serta dengan adanya kehadiran dari bangunan ini dapat membantu warga lokal dan lingkungan sekitarnya. Memikirkan fungsi lain yang dapat ada saat tidak terdapat kegiatan yang dilaksanakan. Ketiga proyek juga memiliki perbedaan dalam pendekatan desain dikarenakan adanya masalah lingkungan sekitar dan konteks yang ada walaupun, secara hasil tidak jauh berbeda. Terdapat persamaan dari dua proyek diatas, dimana menggunakan *system modular* salah satunya adalah *scaffolding* sebagai tempat untuk berdagang. Hal ini dapat membantu pedagang untuk dapat menyesuaikan kebutuhan dalam melakukan kegiatan berdagang dan memudahkan bongkar pasang dikarenakan ciri dari PKL yang sementara dan tidak tetap. Memperlihatkan cara baru dalam berdagang serta dapat menarik pengunjung yang lalu Lalang disekitar.

Hasil Penelitian

Terdapat beragam pendekatan dalam menangani permasalahan yang dihadapi oleh PKL, dan dampak yang ditimbulkannya. Meskipun arsitek memegang peran krusial dalam solusi, partisipasi aktif pemerintah dalam perencanaan dan pengembangan infrastruktur sekitar menjadi penting untuk memastikan keberhasilan implementasi. Peran arsitek tidak hanya selesai pada tahap tersebut, melainkan terus berperan dalam menemukan inovasi dan solusi yang efektif, dengan penyesuaian terhadap ruang publik dan lingkungan sekitarnya.

Pentingnya peran pemerintah dalam membantu perencanaan adalah kunci keberhasilan proyek. Melalui inisiatif ini, proyek tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi bagi PKL, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat lokal dan pendatang. Proyek ini diarahkan untuk memberikan dampak positif yang lebih besar terhadap lingkungan dan masyarakat sekitarnya dengan menyediakan fasilitas yang berfungsi dan mendukung kehidupan sehari-hari. Lebih dari sekadar tempat jualan atau konsumsi, proyek ini dimaksudkan untuk menciptakan ruang ketiga atau "*third place*" yang berperan lebih luas. Tempat ini tidak hanya berfungsi sebagai lokasi transaksi ekonomi, melainkan juga menjadi tempat berkumpul, bersosialisasi, dan tempat untuk istirahat sejenak dari rutinitas padat pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Penelitian ini akan terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman, tentu saja akan ada cara yang lebih efektif dan baik dikedepannya. Tantangan yang harus dihadapi bagi PKL saat ini sudah cukup banyak dari permasalahan dalam lokasi berjualan, sampai harus bersaingnya dengan sistem penjualan online yang serba cepat di zaman ini. Walaupun tantangannya cukup sulit, PKL tidak akan hilang dan terus menemukan cara untuk beradaptasi mengikuti perkembangan zaman.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dalam konteks pertumbuhan penduduk di Indonesia, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, urbanisasi menjadi fenomena yang signifikan. Meskipun pertumbuhan ini memberikan peluang bagi peningkatan kualitas hidup, sektor formal tidak mampu menyediakan lapangan kerja yang cukup untuk memenuhi kebutuhan populasi yang berkembang pesat. Sebagai alternatif, sektor informal, khususnya Pedagang Kaki Lima (PKL), menjadi solusi bagi banyak individu yang tidak memenuhi persyaratan sektor formal. Meskipun PKL memberikan kontribusi positif terhadap berbagai aspek kehidupan kota, kehadiran mereka juga menimbulkan beberapa masalah terkait dengan penggunaan ruang publik. Diperlukan adanya kerja sama dan respon terhadap masalah ini, dari sisi pemerintah maupun masyarakat. Dari segi arsitektur dapat membantu dalam mendesain dan melakukan tata ruang publik agar dapat terus terjaga bersih dan estetik. Penelitian ini juga membuktikan bahwa terdapat berbagai cara selain relokasi PKL yang dapat diterapkan dalam menjaga kebersihan serta estetika ruang publik kota, tetapi tetap menjaga kesejahteraan hidup PKL dan memajukan kehidupan masyarakat sekitar.

Saran

Saran yang bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat belajar dari jurnal dan hasil penelitian ini, serta dapat memperbaiki dan memperdalam lebih lanjut mengenai topik dan isu dari penelitian ini. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu membaca dalam melakukan penelitian lebih lanjut ataupun dalam mengerjakan proyek yang akan direalisasi ataupun tidak direalisasi.

REFERENSI

- Alisjahbana. (2003). Kajian tentang Kondisi dan Kebijakan Sektor Informal di Indonesia. *Buletin Ilmiah*, 335-345.
- Anjani, D. (2022). *Upaya Pedagang Kaki Lima Dalam Memenuhi Kebutuhan Dasar Keluarga Di Era Pandemi Covid-19* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Malang).

- An-nat, B. (1993). Implementasi Kebijakan Penanganan PKL: Studi Kasus di Yogyakarta dan DKI, Pascasarjana Magister Administrasi Publik. *UGM: Yogyakarta*.
- Apriyanto, S. Y. (2003). *Pergulatan Pedagang Kaki Lima di Perkotaan*. Jakarta.
- Ardhiansyah, J. S. (2003). *Kesehatan Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjamada University Press.
- Ari, B. (2008, November). Penanganan Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung Dengan Perspektif Kebijakan Publik. Pendidikan Profesional, IV.
- Budiningsih, C. A. (2008). *Pembelajaran*. Yogyakarta: PT. Rineka Cipta.
- Caballero, P. (2023, May 01). Targ blonie market / Aleksandra Wasilkowska Architectural studio. Retrieved from ArchDaily: https://www.archdaily.com/1000251/targ-blonie-market-aleksandra-wasilkowska-architectural-studio?ad_medium=gallery
- Droog, S., & Vries, P. d. (2009). Emotion in architecture: The experience of the user.
- Goleman, D. (1996). *Kecerdasan emosional*. Jakarta, Indonesia: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Hantono, D., Sidabutar, Y. F., & Hanafiah, U. I. (2018). Kajian Ruang Publik Kota Antara Aktivitas dan Keterbatasan. Langkau Betang: *Jurnal Arsitektur*, 5(2), 80-86.
- Hayat, M. (2012). Strategi bertahan hidup pedagang kaki lima (PKL). *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 8(2), 63-73.
- Hodgson, L. K., & Wertheim, E. H. (2007). Does good emotion management aid forgiving? Multiple dimensions of empathy, emotion management and forgiveness of self and others. *Journal of Social and Personal Relationships*, 24(6), 931-949.
- Hoffman, M. L. (2000). *Empathy and Moral Development: Implications for Caring and Justice*. Cambridge University Press. doi:<https://doi.org/10.1017/CBO9780511805851>
- Hughes, G. (1999). Urban revitalization: The use of festive time strategies. *Leisure studies*, 18(2), 119-135.
- Hurlock, E. B. (1978). *Perkembangan Anak*. Jakarta: Erlangga.
- Jayadinata, J. T. (1986). *Tata guna tanah dalam perencanaan pedesaan, perkotaan dan wilayah*. Penerbit Itb.
- Maneepong, C., & Walsh, J. C. (2013). A new generation of Bangkok Street vendors: Economic crisis as opportunity and threat. *Cities*, 34, 37-43.
- Manning, C., & Effendi, T. N. (1991). *Urbanisasi, pengangguran, dan sektor informal di kota*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Nurhanisah, Y. (2023, Maret). *Berapa Jumlah Penduduk Indonesia Ya?*. Retrieved April 2023, from Indonesia Baik: <https://indonesiabaik.id/infografis/berapa-jumlah-penduduk-indonesia-ya#:~:text=Berdasarkan%20data%20Badan%20Pusat%20Statistik,sebanyak%20272%2C68%20juta%20jiwa>.
- Oldenburg, R., & Brissett, D. (1982). The third place. *Qualitative sociology*, 5(4), 265-284.
- Pranata, A. A., & Purbadi, Y. D. (2020). Pemetaan Tema: Upaya Menemukan Peluang Baru Penelitian Pedagang Kaki Lima PKL. *Jurnal Arsitektur Komposisi*, 13(2), 121-136.
- Pratimaratri, U., Gustaliza, R. B., & Wongso, J. (2017). Sosialisasi Gerakan PKL Hebat dalam Rangka Mendukung Program Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Padang. Prosiding SNaPP: Sosial, Ekonomi dan Humaniora, 7(1), 185-191.
- Ramdhani. (2005). *Ketertiban Umum dan Pedagang Kaki Lima*. Yogyakarta: YPAPI.
- Sastrawan, I. W. (2015). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Lokasi Usaha Pedagang Kaki Lima di Pantai Penimbangan Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng*. 5. Retrieved April 11, 2023
- Stein, S., & Howard, E. (2002). *The Eq Edge: Emotional Intelligence and Your Success Ledakan EQ: 15 Prinsip Dasar Kecerdasan Emosional Meraih Sukses*. Murtanto terj. TRJ dan Y, editor. Bandung: Kaifa.
- Tapia, D. (2020, June 09). Dadad Market / Bangkok Tokyo Architecture + Oph. Retrieved from ArchDaily: https://www.archdaily.com/905924/dadad-market-bangkok-tokyo-architecture-plus-oph?ad_medium=gallery

- Utami, T. (2010). Pemberdayaan komunitas sektor informal pedagang kaki lima (pkl), suatu alternatif penanggulangan kemiskinan. *Jurnal Sosiologi*, 25(2), 114-123.
- Yolechang 2020 market / uao design. (2020, November 02). Retrieved from ArchDaily: https://www.archdaily.com/950460/yolechang2020-market-uao-design?ad_source=search&ad_medium=projects_tab
- Yunus, A. I. (2011). *Potret kehidupan sosial ekonomi pedagang kaki lima Di kota makassar (kasus penjual pisang epe di pantai losari)*. Makassar: Universitas Hassanuddin.